

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, menurut definisi Sugiono (2019:17) kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma positivisme. Tujuan penelitian ini untuk mengukur, menyelidiki dan memahami interaksi antar variabel yang diteliti serta melakukan uji hipotesis pada variabel. Dalam penelitian ini metode kuantitatif digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian dalam proses pengumpulan datanya. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk menjawab hipotesis mengenai keadaan subjek penelitian saat ini dengan menganalisis fakta-fakta yang ada pada populasi saat ini (Herawati, 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian akan berfokus pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2019:126), populasi adalah suatu bidang yang mencakup objek dan subjek dengan karakteristik tertentu dan jumlah tertentu, yang menjadi fokus penelitian sebelum menyajikan hasilnya. Populasi penelitian ini terdiri dari laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan jumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tahun anggaran 2020-2022.

Dengan demikian, sampel yang akan digunakan adalah 114 sampel berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penggunaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2020-2022 dipilih karena dokumen tersebut telah diaudit berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, (Sugiono, 2019:133) yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penelitian. Dilakukan *purposive sampling* dengan memilih seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang menyediakan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020–2022.
2. Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama masa penelitian.

Kabupaten/Kota yang menyediakan data terkait dengan pengukuran variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, total aset daerah, dan umur pemerintah daerah.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Timur tahun periode 2020–2022.

3.5 Sumber Data

Sumber data sekunder tersebut diperoleh melalui situs website milik Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dapat diakses melalui <http://jatim.bpk.go.id>.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2014:401). Metode pengambilan data yang digunakan berupa data dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dokumen dari pemerintah daerah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3.7 Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Konsep ini sejalan dengan definisi Sugiono (2019:69), yang menggambarkan variabel independen sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, sementara variabel dependen adalah faktor yang dipengaruhi oleh variabel independen.

3.7.1 Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diukur adalah tingkat wajib pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proses pengukuran tingkat pengungkapan melibatkan kesetaraan antara pengungkapan yang diwajibkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat pengungkapan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan daftar *checklist* yang mencakup elemen-elemen pengungkapan yang harus ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Setiap item informasi yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian dinilai “ya” atau “tidak” berdasarkan *checklist* yang telah disiapkan. Nilai 1 diberikan jika pengungkapan dilakukan (“ya”), sedangkan nilai 0 diberikan jika tidak dilakukan pengungkapan (“tidak”).
3. Menggabungkan total nilai yang diberikan pada setiap laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menghitung tingkat pengungkapan dengan menjumlahkan nilai-nilai tersebut dan membandingkannya dengan nilai terbesar yang bisa diperoleh apabila pengungkapan dilakukan sepenuhnya.

Dengan demikian, tingkat pengungkapan wajib LKPD dapat diukur dengan menggunakan sistem skoring pada daftar *checklist* pengungkapan yang dibuat berdasarkan SAP dan dirumuskan sebagai berikut:

$$DISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$$

3.7.2 Variabel Independen (X)

3.7.2.1 Kemandirian Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian mencerminkan derajat ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendanaan eksternal (Finakesti et al., 2022). Tingkat kemandirian dapat berbeda-beda di antara pemerintah daerah tergantung pada konstitusi atau peraturan yang mengatur pemerintahan lokal. Tingginya tingkat kemandirian suatu pemerintahan dipengaruhi oleh PAD yang besar pula (Herawati, 2018). Oleh karena itu, pengukuran tingkat kemandirian dapat dilakukan dengan menilai antara jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dan jumlah kewajiban, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{MANDIRI} = \frac{\text{PAD}}{\text{Tot. Pend. Transfer} + \text{Tot. Kewajiban}}$$

3.7.2.2 Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemerintah daerah, merupakan penghasilan yang diperoleh suatu pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota dalam suatu wilayah negara. Banyak pengukuran yang dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah. Dalam penelitiannya (Merliani et al., 2018) dan (W. Putri & Arza, 2019) menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pengukurannya.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari eksploitasi sumber daya daerah yang dikelola secara terpisah dan pendapatan dari sumber lainnya. (Rahmayani, 2018) menyatakan bahwa PAD adalah salah satu pendapatan utama yang berasal dari pemerintah daerah dan merupakan potensi pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat berasal dari berbagai sumber, dan penghitungannya dapat dilakukan dengan metode berikut:

$$\text{PAD} = \text{Total Pendapatan Asli Daerah}$$

3.7.2.3 Total Aset Pemerintah Daerah

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh suatu pemerintah daerah akibat masa lalu, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masa mendatang (Noviawati, 2021). Total aset mencakup seluruh aset keuangan, investasi, dan aset ekonomi lainnya yang dimiliki atau diberikan kepada pejabat pemerintah daerah. Hal ini mencakup hal-hal seperti tanah, bangunan, kendaraan, investasi saham, serta

kas dan setara kas. Jumlah aset dalam neraca pemerintah suatu daerah menunjukkan nilai aset pemerintahan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Rahayu, 2016). Sehingga total aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ASET} = \text{Tot. Aset dalam Neraca}$$

3.7.2.4 Umur Pemerintah Daerah

Menurut (Rahmayani, 2018) variabel umur pemerintah provinsi diukur sejak penyusunan undang-undang kabupaten/kota diterbitkan. Pemerintah daerah yang telah beroperasi cukup tua cenderung memiliki sumber daya yang lebih melimpah, lebih banyak pengalaman, dan lebih banyak komitmen untuk transparansi, yang dapat membantu pengungkapan yang lebih baik. Dalam hal ini umur pemerintahan daerah dihitung dari tahun dibentuknya atau hari jadinya hingga tahun 2020, 2021, 2022. Untuk mengetahui umur pemerintah daerah, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AGE} = \text{Umur Pemerintah Daerah}$$

3.8 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (LKPD) Jawa Timur tahun 2020–2022. Uji hipotesis dalam penelitian ini juga akan mencakup berbagai analisis regresi linier berganda.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan analisis statistik deskriptif untuk mengolah data dengan cara memaparkan atau menguraikan data yang telah dikumpulkan tanpa menyusun

kesimpulan yang dapat diaplikasikan secara lebih luas atau umum (Sugiono, 2019). Data diperiksa dengan menggunakan nilai-nilai seperti mean, standar deviasi, deviasi, maksimum, minimum, dan rentang data dalam analisis statistik deskriptif. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan rata-rata penyimpangan data, sedangkan, maksimum, minimum, dan range masing-masing menunjukkan tingkat kesalahan rata-rata penyimpangan data (Rahayu, 2016).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah data yang akan dianalisis berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018:161). Untuk menguji kenormalan data dalam penelitian ini, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dianggap mengikuti distribusi normal jika memiliki probabilitas besarnya lebih dari $\alpha = 5\%$ atau $\text{sig} > 0,05$. Metode lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melihat *probability* plot. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila garis yang menggambarkan data sebenarnya mengikuti garis lurus diagonal (Ghozali, 2018:161). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Data dapat dikatakan berdistribusi normal, apabila titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal.
- 2) Data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal, apabila titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Digunakan uji multikolinieritas dalam model regresi, guna mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antar variabel independen. Adanya multikolinieritas dinilai dengan mempertimbangkan nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF)

(Ghozali, 2018:107). Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah ada multikolinieritas dalam pengambilan keputusan atau tidak:

- a. Apabila VIF nilainya melebihi 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,1, maka dalam model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas.
- b. Apabila VIF nilainya tidak lebih dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,1, maka dalam model regresi menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas.

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Digunakan uji heteroskedastisitas sebagai penilai ada atau tidaknya keseragaman dalam variabel dan residu antara pengamatan yang berbeda dalam suatu model regresi. Apabila tidak ada ketidakseragaman, maka model regresi dikatakan homoskedastis dan dianggap lebih baik. Pola scatterplot dapat menjadi indikator adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilihat pada pola scatterplot antar SRESID dengan ZPRES dimana sumbu Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Ghozali, 2018:138).

Suatu model regresi dianggap homoskedastis jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Di sekitar nilai nol data menyebar rata, letaknya di atas maupun di bawah nilai nol;
- 2) Data tidak hanya memenuhi satu sisi saja, baik di atas atau di bawah nilai nol;
- 3) Pola sebaran data tidak menampilkan gelombang yang meluas dan mengecil secara berulang;
- 4) Tidak terdapat pola dalam sebaran data.

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi, sesuai dengan (Ghozali, 2018:111) adalah untuk menilai ada atau tidaknya korelasi antara gangguan pada periode t dan kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, yaitu $t-1$ dalam model regresi linier. Dalam analisis data, uji autokorelasi sangat penting karena ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola autokorelasi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah.

Uji Durbin-Watson (DW test) dilakukan sebagai salah satu metode untuk menentukan apakah autokorelasi ada atau tidak dalam suatu model regresi, sebagaimana dijelaskan oleh (Rahayu, 2016). Kriteria yang digunakan dalam DW test adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai $DW < -2$, maka dapat menunjukkan bahwa adanya gejala autokorelasi positif pada data.
- 2) Apabila nilai DW ada diantara -2 sampai dengan $+2$, maka dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada data.
- 3) Apabila nilai $DW > +2$, maka dapat menunjukkan bahwa adanya gejala autokorelasi negatif pada data.

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, total aset daerah, dan umur pemerintah daerah. Sementara itu, variabel dependen adalah tingkat pengungkapan wajib LKPD. Keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel

terikat akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dan dapat dinyatakan dalam bentuk model regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

α = Alpha

β_1 - β_6 = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1 = Tingkat Kemandirian Pemerintah

X2 = Kekayaan Pemerintah Daerah

X3 = Total Aset Daerah

X4 = Umur Pemerintah Daerah

ε = Error Trem

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variabel terikat ditunjukkan dengan uji koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menerapkan variasi variabel dependen. Variabilitas variabel terikat dapat dijelaskan oleh model koefisien determinasi dengan kisaran 0 hingga 1, model tersebut semakin baik apabila mendekati nilai 1. Variasi variabel terikat nilai variabel terikat mendekati nilai satu (Rahayu, 2016).

3.8.4.2 Uji Statistik F

Untuk mengetahui apakah variabel terikat dalam suatu model statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas maka dilakukan uji F. Derajat kebebasan df

sering kali ditetapkan pada (nk) dan $(k-1)$, di mana n adalah jumlah sampel, dan ambang batas signifikansi biasanya ditetapkan sebesar 5% untuk menghitung nilai F-tabel. Menurut (Ghozali, 2018:79) kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Hipotesis nol (H_0) diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau jika probabilitas lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (Sig 0,05).
- 2) Hipotesis nol (H_0) ditolak apabila nilai F hitung lebih rendah dari nilai F tabel atau jika probabilitas melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan (Sig 0,05).

3.8.4.3 Uji Parsial

Menurut (Ghozali, 2018:98), uji parsial atau uji t statistik digunakan untuk mengetahui secara jelas apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam perhitungan ini t-hitung dan tingkat signifikansinya (5% atau 0,05) diambil dari t-tabel. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan uji t:

- 1) Merumuskan hipotesis untuk setiap variabel
- 2) Menentukan tingkat signifikansi yaitu 0,05 (5%)
- 3) Membandingkan tingkat signifikansi dengan menggunakan aplikasi SPSS
 - H_1 diterima apabila nilai $t < 0,05$, sehingga dapat dikatakan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - H_1 ditolak apabila nilai $t > 0,05$, sehingga dapat dikatakan semua variabel independen secara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
- 4) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

- Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat dikatakan semua variabel independen secara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

